



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022, telah disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 55);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 29 September 2022

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

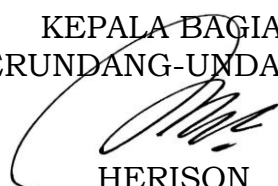
Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 29 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 72 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER  
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN  
SETELAH PERUBAHAN PARSIAL II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | URAIAN  | TARGET PARSIAL 2  | TARGET S.D TW I |       | TARGET S.D TW II  |       | TARGET S.D TW III |       | TARGET S.D TW IV     |     |
|----|---|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-----|
|    |   |                   | Jumlah          | %     | Jumlah            | %     | Jumlah            | %     | Jumlah               | %   |
| I  | Hasil Pajak Daerah  | 2.200.451.059.000 | 540.000.000.000 | 24,54 | 1.065.000.000.000 | 48,40 | 1.630.451.059.000 | 74,10 | 2.200.451.059.000,00 | 100 |
|    | a Pajak Hotel   | 100.392.198.000   | 25.309.815.440  | 25,21 | 45.300.020.980    | 45,12 | 71.698.460.581    | 71,42 | 100.392.198.000,00   | 100 |
|    | b Pajak Restoran dan Sejenisnya                           | 180.579.809.000   | 47.213.356.070  | 26,15 | 91.946.755.467    | 50,92 | 141.354.020.132   | 78,28 | 180.579.809.000,00   | 100 |
|    | c Pajak Hiburan   | 42.194.590.000    | 8.806.452.910   | 20,87 | 17.869.014.020    | 42,35 | 27.803.294.150    | 65,89 | 42.194.590.000,00    | 100 |
|    | d Pajak Reklame   | 20.001.086.000    | 4.410.284.532   | 22,05 | 8.979.520.361     | 44,90 | 12.999.732.132    | 65,00 | 20.001.086.000,00    | 100 |
|    | e Pajak Penerangan Jalan                                  | 289.206.000.000   | 72.086.834.800  | 24,93 | 145.413.794.000   | 50,28 | 217.094.470.400   | 75,07 | 289.206.000.000,00   | 100 |
|    | f Pajak Parkir  | 12.511.988.000    | 2.412.269.228   | 19,28 | 5.528.834.660     | 44,19 | 8.903.207.185     | 71,16 | 12.511.988.000,00    | 100 |
|    | g Pajak Air Tanah   | 70.062.497.000    | 16.217.596.645  | 23,15 | 31.783.283.392    | 45,36 | 49.813.913.892    | 71,10 | 70.062.497.000,00    | 100 |
|    | h Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 120.725.032.000   | 27.146.132.366  | 22,49 | 53.617.236.501    | 44,41 | 82.502.473.600    | 68,34 | 120.725.032.000,00   | 100 |
|    | i Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 574.049.109.000   | 180.000.000.000 | 31,36 | 331.329.735.367   | 57,72 | 474.092.967.538   | 82,59 | 574.049.109.000,00   | 100 |
|    | j Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 790.728.750.000   | 156.397.258.009 | 19,78 | 333.231.805.252   | 42,14 | 544.188.519.390   | 68,82 | 790.728.750.000,00   | 100 |

|    |                  |  |                |               |                |                |                 |                |                 |                |     |
|----|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
| II | Retribusi Daerah | 147.745.810.287  | 26.710.532.105 | 18,08         | 55.973.271.862 | 37,88          | 103.105.319.694 | 69,79          | 146.135.810.291 | 99             |     |
|    | A                | Retribusi Jasa Umum                                      | 34.612.049.167 | 6.804.843.453 | 19,66          | 15.562.600.357 | 44,96           | 24.416.142.261 | 70,54           | 33.002.049.171 | 95  |
|    | 1                | Retribusi Pelayanan Kesehatan                            | 6.440.000.000  | 1.610.000.000 | 25,00          | 3.220.000.000  | 50,00           | 4.830.000.000  | 75,00           | 4.830.000.004  | 75  |
|    | 2                | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan              | 20.479.727.925 | 3.723.586.893 | 18,18          | 9.308.967.237  | 45,45           | 14.894.347.581 | 72,73           | 20.479.727.925 | 100 |
|    | 3                | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat       | 200.000.000    | 30.000.000    | 15,00          | 80.000.000     | 40,00           | 140.000.000    | 70,00           | 200.000.000    | 100 |
|    | 4                | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 270.000.000    | 67.500.000    | 25,00          | 135.000.000    | 50,00           | 202.500.000    | 75,00           | 270.000.000    | 100 |
|    | 5                | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                   | 2.521.626.242  | 630.406.560   | 25,00          | 1.260.813.120  | 50,00           | 1.891.219.680  | 75,00           | 2.521.626.242  | 100 |
|    | 6                | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus           | 759.600.000    | 152.350.000   | 20,06          | 330.820.000    | 43,55           | 534.075.000    | 70,31           | 759.600.000    | 100 |
|    | 7                | Retribusi Tera/Tera Ulang                                | 2.490.000.000  | 588.700.000   | 23,64          | 1.222.000.000  | 49,08           | 1.916.300.000  | 76,96           | 2.490.000.000  | 100 |
|    | 8                | Retribusi Menara Telekomunikasi                          | 1.441.095.000  | -             | 0,00           | -              | 0,00            | -              | 0,00            | 1.441.095.000  | 100 |
|    |                  |  |                |               |                |                |                 |                |                 |                |     |
|    | B                | Retribusi Jasa Usaha                                     | 11.517.161.120 | 1.575.278.652 | 13,68          | 3.693.371.505  | 32,07           | 6.475.567.433  | 56,23           | 11.517.161.120 | 100 |
|    | 1                | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                      | 10.554.931.120 | 1.347.356.152 | 12,77          | 3.212.159.005  | 30,43           | 5.754.867.433  | 54,52           | 10.554.931.120 | 100 |
|    |                  | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan:                  | 2.844.761.960  | 252.342.173   | 8,87           | 470.248.948    | 16,53           | 668.993.232    | 23,52           | 2.844.761.960  | 100 |
|    |                  | a. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)    | 2.733.871.960  | 252.342.173   | 9,23           | 414.803.948    | 15,17           | 613.548.232    | 22,44           | 2.733.871.960  | 100 |
|    |                  | b. DISKANAK (Dinas Perikanan dan Peternakan)             | 110.890.000    | -             | 0,00           | 55.445.000     | 50,00           | 55.445.000     | 50,00           | 110.890.000    | 100 |
|    |                  | c. DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga)                   | 3.250.085.000  | 107.899.350   | 3,32           | 875.510.200    | 26,94           | 1.963.073.750  | 60,40           | 3.250.085.000  | 100 |
|    |                  | d. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)                          | 213.462.720    | 42.692.583    | 20,00          | 98.192.943     | 46,00           | 157.962.561    | 74,00           | 213.462.720    | 100 |

|        |   |                   |                 |       |                   |       |                   |       |                   |     |
|--------|---|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----|
| 2      | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 363.000.000       | 90.750.000      | 25,00 | 181.500.000       | 50,00 | 272.250.000       | 75,00 | 363.000.000       | 100 |
| 3      | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan  | 589.230.000       | 134.672.500     | 22,86 | 294.712.500       | 50,02 | 440.950.000       | 74,83 | 589.230.000       | 100 |
| 4      | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                    | 10.000.000        | 2.500.000       | 25,00 | 5.000.000         | 50,00 | 7.500.000         | 75,00 | 10.000.000        | 100 |
| C      | Retribusi Jasa Perizinan Tertentu   | 101.616.600.000   | 18.330.410.000  | 18,04 | 36.717.300.000    | 36,13 | 72.213.610.000    | 71,06 | 101.616.600.000   | 100 |
| 1      | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  | 95.000.000.000    | 17.100.000.000  | 18,00 | 33.250.000.000    | 35,00 | 66.500.000.000    | 70,00 | 95.000.000.000    | 100 |
| 2      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                     | 169.000.000       | 30.410.000      | 17,99 | 67.300.000        | 39,82 | 113.610.000       | 67,22 | 169.000.000       | 100 |
| 3      | Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing       | 6.447.600.000     | 1.200.000.000   | 18,61 | 3.400.000.000     | 52,73 | 5.600.000.000     | 86,85 | 6.447.600.000     | 100 |
| Jumlah |   | 2.348.196.869.287 | 566.710.532.105 | 24,13 | 1.120.973.271.862 | 47,74 | 1.733.556.378.694 | 73,83 | 2.346.586.869.291 | 100 |

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON